

Komisi IV DPRD Trenggalek Beri Catatan Tiga OPD Terkait Persiapan Pelaksanaan APBD 2022

Agus Riyanto - TRENGGALEK.INDONESIASATU.ID

Mar 3, 2022 - 06:25



Suasana rapat kerja Komisi IV bersama tiga OPD mitra

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas persiapan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (2/3/2022).

Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga memberikan beberapa catatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), RSUD dr. Soedomo serta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP-KB).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin mengatakan, hasil rapat kali ini ada beberapa catatan penting dari tiga OPD tersebut. Sehingga perlu adanya tindak lanjut.

"Tadi kami meminta masing-masing OPD untuk menjelaskan progres kegiatannya di APBD Tahun Anggaran 2022," ucapnya.

Sukarodin menuturkan, dari hasil laporan pihak RSUD dr. Soedomo terkait retribusi parkir yang sejak tahun 2019 belum ada pemasukan masih dalam tahap audit.

Dari pihak rumah sakit menyebut jika sudah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan akan mendalami terkait MoU. "Nanti juga akan melibatkan tim audi independen untuk penentuan sikap, yaitu memutuskan kontrak atau tidak dengan pihak ketiga pengelola lahan parkir tersebut," imbuhnya.

Untuk Dinas Kesehatan, Sukarodin menyoroti terkait sisi keadilan pelayanan. Pendeknya, selama ini masyarakat yang jarak tempuhnya jauh dari rumah sakit lebih memilih ke Puskesmas. Dengan asumsi lokasinya lebih dekat.

"Kami berharap Puskesmas yang jauh dari kota, sarana dan prasarananya untuk diperbaiki. Misal, di Kecamatan Watulimo, dari hasil sidak ternyata lahannya kurang. Sehingga wajib ada pengembangan Puskesmas Watulimo tahun 2023," tandasnya.

Politisi PKB ini juga menyampaikan, untuk Disdikpora, pihaknya lebih fokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempersyaratkan lokasi yang akan dibangun sudah bersertifikat.

Sementara itu, masih lanjut Kang Sukar sapaan akrabnya, di Kabupaten Trenggalek baru ada dua SD yang sudah jelas kepemilikan sertifikatnya.

"Kami meminta kepada Pemkab untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, agar DAK bisa terealisasi tepat waktu," pungkasnya (ags).